

1 Oktober

ANALISIS BUDAYA

ARIEL HERYANTO

Profesor Emeritus dari Universitas Monash, Australia



Ada yang lebih mengerikan daripada kisah gas air mata dan besarnya jumlah korban dari Tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober 2022. Yang paling mengerikan: tragedi itu seharusnya bisa dihindarkan. Hingga kini berbagai kajian rinci tidak menemukan alasan mengapa tembakan gas air mata diobral ke tribun penonton.

Bukan saja gas air mata terlarang digunakan di sana. Yang lebih memilukan: tidak ada situasi gawat yang membutuhkan satu pun tembakan terlarang itu. Tidak ada tawuran antarsuporter. Tidak ada serbuan massa yang mengancam nyawa pemain ataupun petugas.

Tidak semua kekerasan negara bisa dibenarkan sekalipun dampaknya membawa manfaat bagi negara atau masyarakat umum. Ada kekerasan yang tidak bisa dibenarkan karena kadarnya berlebihan. Apalagi kekerasan yang bersifat acak atau membabi buta, yakni kekerasan yang diobral tanpa alasan, tujuan, atau keuntungan bagi pelakunya atau siapa pun.

Sebesar apa keuntungan yang dicari pihak di balik pembunuhan Udin, Marsinah, ataupun Munir? Sudahkah proses hukum diusahakan maksimal untuk memberi keadilan bagi semua kasus itu? Apakah Orde Baru tidak bisa bangkit tanpa pembantaian hampir sejuta anak bangsa, setelah Soeharto menaklukkan G30S pada 1 Oktober 1965?

Pertengahan Mei 1998, Jakarta terbakar oleh ledakan amunisi yang lazim di medan perang. Penjarahan dan pemerkosaan massal marak selama 48 jam nyaris tanpa hambatan dari aparat. Adakah keuntungan besar yang dicari atau diperoleh sebagian elite negara? Jika ada, betapa kejinya. Apabila tidak, betapa mengerikan kekerasan acak itu!

Obral kekerasan acak, atau tanpa alasan yang sepadan dengan akibat yang bisa diduga sebelumnya, bisa terjadi bahkan berulang-ulang jika kondisi memungkinkan.

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

1 Oktober

(Sambungan dari halaman 1)

Misalnya apabila ada pihak yang menikmati impunitas. Mereka merasa kebal hukum sehingga tak khawatir sanksi hukum. Kalaupun diadili, mereka yakin akan dibebaskan. Jika terdesak tekanan massa atau tekanan internasional, mereka hanya meminta maaf. Kalau perlu, beberapa orang kecil ditumbalkan sebagai "oknum".

Kita terpaksa berdamai dengan aneka bahaya yang tidak mampu kita taklukkan, misalnya Covid-19, korupsi, dan impunitas. Tragedi Kanjuruhan mungkin tidak terjadi, atau terjadi tidak separah itu, jika berbagai kasus kekerasan di sekitar pertandingan sepak bola sebelumnya diusut tuntas. Berbagai kasus lama itu sendiri tidak terulang andaikan berbagai kekejaman berat lain di luar lingkungan sepak bola sudah ditindak tegas, adil, dan tuntas secara hukum.

Tragedi 1 Oktober 2022 di Kanjuruhan menguji penegakan hukum dan kesabaran bangsa. Langkah awal pemerintah dan sejumlah lembaga swasta layak dihargai. Semoga kasusnya diusut tuntas dan yang bersalah dihukum setimpal.

Namun, kerugian para penyintas dan keluarga korban tidak terlunasi oleh ganti rugi sebesar apa pun. Tuntasnya satu kasus itu juga tidak membasmi habis akar masalah yang memungkinkan obral kekerasan. Tragedi Kanjuruhan bukan kasus tunggal yang lepas dari sejarah kekerasan nasional.

KOMPAS

SABTU, 22 OKTOBER 2022

diunduh dari arielheryanto.com

Kunci kejayaan Indonesia di masa depan terletak pada pembenahan radikal dalam bidang hukum dan pendidikan. Pendidikan membuka peluang selebar-lebarnya bagi pertumbuhan kreatif anak bangsa. Hukum menutup serapat mungkin peluang dan bakat kita yang bersifat merusak.

Pendidikan berlangsung tidak hanya di sekolah. Hukum tidak terwujud sebatas ruang pengadilan. Keduanya dihayati warga dalam aneka ruang dan ragam, termasuk kehidupan sehari-hari di rumah tangga, tempat kerja, juga lapangan sepak bola.

Perombakan hukum dan pendidikan tidak mudah. Dibutuhkan kerja sama pihak-pihak berjangka panjang, selain dana besar. Dana bukan masalah besar bagi Indonesia. Dibandingkan dengan banyak negara lain, Indonesia terbilang makmur walau kemakmuran itu tidak merata. Yang lebih sulit diharapkan adalah komitmen bersama bagi perbaikan radikal dalam bidang hukum dan pendidikan.

Di mana pun hukum cenderung bias menguntungkan elite. Tidak ada insentif bagi mereka untuk merombaknya secara radikal karena itu berisiko "bunuh diri" secara politis dan ekonomis. Kaum elite memiliki peluang terbesar, tetapi bukan minat besar untuk investasi pendidikan nasional berjangka panjang.

Pendidikan cemerlang di banyak negara merupakan kerja keras yang hasilnya baru bisa dinikmati beberapa generasi kemudian. Kebijakan demikian membutuhkan negarawan berwawasan jauh ke depan. Sosok demikian bisa lahir dari tuntutan mayoritas pemberi suara dalam pemilu, yang disambung dukungan, pantauan, dan evaluasi dari lembaga independen sesuai pemilu.

Kebijakan berkiblat masa depan sulit diharapkan apabila debat publik terpusat pada sosok personal individu politikus, agamanya, atau etnisitasnya. Apabila setiap pergantian pemerintah terjadi perubahan kebijakan pendahulunya. Jika ambisi pejabat negara terpusat pada prestasi jangka pendek sesuai tuntutan masyarakat akan hasil instan dari setiap pemerintah.

Membandingkan prestasi satu pemerintahan dengan pendahulunya sebatas masa jabatan merupakan kebiasaan buruk. Kinerja sebuah rezim sering ditentukan oleh warisan prestasi dan masalah dari pendahulunya.

Sepuluh hari sebelum Tragedi Kanjuruhan, Presiden Joko Widodo membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran berat HAM masa lalu. Keputusan itu menimbulkan dua kesan. Pertama, Presiden tidak percaya lembaga peradilan mau atau mampu menuntaskan masalah itu sehingga diambilnya jalan pintas. Kedua, impunitas akan berumur panjang bagi yang punya koneksi kuat.

Kini, banyak pihak menuntut kasus Kanjuruhan diusut tuntas. Kalaupun tuntutan itu terpenuhi, ia merupakan reaksi keras pada kasus besar. Namun, tindakan itu tidak membongkar akar masalah struktural yang sudah kronis dalam sejarah nasional. Maka, ia tidak dengan sendirinya mengakhiri impunitas dan obral kekerasan.

Apa pun hasilnya, proses hukum kasus Kanjuruhan itu akan menjadi pelajaran nasional di luar sekolah tentang makna berbangsa dan bernegara. Apakah 1 Oktober layak diperingati dengan kibaran bendera nasional di puncak tiang, sebagai warisan Orde Baru? Atau diturunkan setengah tiang untuk mengenang para korban tragedi nasional?